ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI PROVINSI DIY TAHUN 2013-2017

Disusun oleh :

Isnaeni Putri Nur Afifah

(15313061)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI PROVINSI DIY TAHUN 2013-2017

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Isnaeni Putri Nur Afifah

Nomor Mahasiswa : 15313061

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

PERTANYAAN BEBAS PLARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

Penulis,



Isnaeni Putri Nur Afifah

PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN UPAH

MINIMUM KABUPATEN DI PROVINSI DIY TAHUN 2013-2017

Nama : Isnaeni Putri Nur Afifah

Nomor Mahasiswa : 15313061

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dr. Sahabudin Sidiq S.E.,M. A.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI PROVINSI DIY TAHUN 2013-2017

Disusun Oleh	:	**ISNAENI PUTRI NUR AFIFAH**
Nomor Mahasiswa	:	**15313061**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 18 Maret 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi	:	Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA. .....
Penguji	:	Prastowo, SE., M.Ec..Dev. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menngucap puji syukur kepada Allah SWT atas rahmatNya skripsi ini dapat diselesaikan

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku

Kepada Bapak dan Ibu tercinta

Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran, serta dukungan.

HALAMAN MOTTO

"Dan Allah bersama orang-orang yang sabar." (Al-Anfal ayat 66)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Asy-Syarh ayat 5-6)

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dank arena syafatnya kita dapat hijrah dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penulis penelitian ini penulis tidak lupa pula mengucapkan rasa terma kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah Nya sehingga ddaoat menyelesaikan penelitian ini.
2. Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan, dan panutan bagi umat manusia di dunia ini.

3. Kedua orang tua penulis, Bapak Safii dan Ibu Iik Adiati yang tidak hentinya memberi dukungan, nasehat, kasih sayang, dan doa selama ini kepada penulis.
4. Kepada keluarga penulis, Mbak Fifi, Mbak Nur, Adek Farhan, Adek Tia, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah memberi semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq S.E.,M.A. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq S.E.,M.A selaku kepala jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman IE 2015 Lulu Maulida, Rizka, Syaqia, Fatih, Fafa, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi dukungan kepada penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
9. Teman-teman SMA Adila, Amalia, Ivana, dan Salma terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dalam setiap ajakan bermain bilamana penulis membutuhkan hiburan.
10. Teman bisnis Whisnu Haryanto terima kasih telah mengingatkan penulis seberapa pentingnya menggapai cita-cita jika menginginkan masa depan yang

sukses, selalu ada jika penulis membutuhkan teman main, dan juga telah memberikan pelajaran dalam hal keseriusan dalam mengejar suatu cita-cita.

11. Teman KKN Tsania, Fanita, Zulia, Iis, Imam, Baso, dan Abib terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan kerja samanya dalam satu bulan.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

Isnaeni Putri Nur Afifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Perumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.5 Sistematika Penulisan 14
BAB II 16
2.1 Penelitian sebelumnya 16
2.2 Landasan Tori 21
2.2.1 Pengertian Upah 21
2.2.2 Teori Upah Efisiensi 21
2.2.3 Upah Minimum 23
2.2.4 Ketentuan dan Penetapan Upah Minimum 24
2.2.5 Prinsip-prinsip dalam Penetapan Kebijakan Upah Minimum di Indonesia 26
2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 27
2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto 30
2.2.8 Pendapatan per Kapita 35
2.2.9 Rata-rata Lama Sekolah 36

3.0.0 Hipotesis 37
BAB III 39
3.1 Variabel Penelitian 39
3.2 Jenis dan Sumber Data 41
a. Metode Data Panel 41
b. Model Penelitian 42
c. Estimasi Regresi Data Panel 42
d. Kesesuaian Model 44
BAB IV 49
4.1 Analisis Deskripsi Data 49
4.2 Hasil Uji Model Regresi Data Panel 52
4.2.1 Pemilihan Model Regresi 52
4.2.2 *Chow Test* (Uji F-statistik) 52
4.2.4 Analisis Data Panel 53
4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2) 54
4.2.5 Uji Serempak (uji F) 55
4.2.6 Uji t 56
4.3 Analisis Ekonomi 59
4.3.1 Analisis Pengaruh TPAK terhadap UMK 59
4.3.2 Analaisis Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap UMK 60
4.3.3 Analisis PDRB terhadap UMK 60
4.3.4 Analisis Rata-rata Lama Sekolah terhadap UMK 61
BAB V 62
5.1 Kesimpulan 62
5.2 Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN I 67

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..... 4

1.2 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa..... 8

1.3 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017..... 9

2.1 Penelitian Terdahulu..... 20

4.1 Analisis Statistik Deskriptif..... 50

4.2 *Chow Test* (uji F-statistik)..... 53

4.3 Uji Hausman..... 54

4.4 Estimasi Uji Regresi *Common Effect*..... 55

4.5 Estimasi Pengujian Hipotesis..... 57

DAFTAR LAMPIRAN

I. Data Upah Minimimum Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto, dan Rata-rata Lama Sekolah

II. Tabel *Common Effect*

III. Tabel *Fixed Effect Model*

IV. Tabel *Random Effect Model*

V. Tabel *Uji Chow*

VI. Tabel *Uji Hausman*

VII. Data Intersep di Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi regional maupun nasional merupakan dimana proses pembangunan ekonomi tersebut dilakukan agar masyarakat atau penduduk di daerah tersebut sejahtera. Dalam terlaksana nya pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin membaik mampu memberi pengaruh terhadap terciptanya lapangan kerja yang tersedia, perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan sarana serta pra sarana yang mampu meningkatkan kualitas hidup seseorang, dan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua lingkup yaitu pembangunan ekonomi regional/lokal dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun hal yang terpenting dalam kelancaran kegiatan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang yang lain adalah sumber daya manusia, sehingga keberadaan jumlah penduduk di suatu negara merupakan unsur terpenting dalam pembangunan. Banyaknya penduduk pada suatu negara tidak memberi harapan keberlangsungan pembangunan ekonomi yang dilakukan berhasil. Ketidakmeratanya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin bertambah dapat menyebabkan sebagian penduduk tidak mendapatkan pekerjaan sehingga mengakibatkan penduduk yang berada di usia kerja menjadi pengangguran. Hal ini mampu mengakibatkan

rendahnya standar hidup masyarakat, sebaliknya jika penduduk pada usia kerja mendapatkan pekerjaan maka standar hidup masyarakat akan meningkat. (Witjaksono, 2009)

Jumlah penduduk provinsi DIY yang tiap tahunnya bertambah ini mampu memberi peluang partisipasi tenaga kerja yang besar bagi pembangunan. Di sisi lain semakin bertambahnya pendudukpada suatu daerah dapat menimbulkan masalah serta hambatan-hambatan tercapainya pembangunan yang dilakukan karena tingginya jumlah angkatan kerja disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk. Laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk ini harus disetarakan dengan jumlah lapangan kerja yang tesedia tercukupi, sehingga penciptaan lapangan kerja yang seimbang dengan jumlah penduduk diharapkan mampu memberi dampak pengurangan pengangguran dengan itu tenaga kerja yang ada mampu berkontribusi ke dalam aktivitas perekonomian.

Terciptanya pasar tenaga kerja berawal dari pertemuan antara pelaku pencari kerja dengan lowongan kerja melalui penempatan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Berbagai regulasi pemerintah yang berlaku merupakan bentuk dari kekakuan dalam pasar tenaga kerja. Seperti contohnya pemberian upah minimum provinsi (UMP), aturan perlindungan dan pesangon tenaga kerja. Hal tersebut mampu memberi saran agar pemerintah mengurangi dalam berkontribusi regulasi di pasar tenaga kerja, dengan

kata lain pengusaha yang menentukan regulasinya sendiri agar tercapainya keseimbangan pasar.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam penetapan nilai UMK. Dengan mengetahui nilai TPAK di setiap kabupaten, maka mampu memberi gambaran tingkat penawaran tenaga kerja pada setiap kabupaten tersebut kepada pemerintah terhadap upah yang sesuai diberikan kepada para pekerja. Di Provinsi DIY sendiri, jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari 1.949.243 pada tahun 2013 menjadi 2.117.187 di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena penduduk berumur 15 tahun keatas mengalami peningktana pada periode yang sama, pada perhitungan yang lain yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi di tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan.

Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat. Penawaran tenaga kerja yang meningkat ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja, dari kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan memungkinkan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak sesuai dengan regulasi yang berjalan. Dan pada akhirnya para pekerja akan diberi upah yang seminimal mungkin sehingga mengurangi tingkat upah.

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	75.61	77.34	75.62	80.20	74.61
Gunung Kidul	77.87	77.65	70.77	75.14	74.5
Sleman	65.67	68.05	65.45	69.67	70.17
Bantul	66.78	67.55	67.84	69.27	72.21
Yogyakarta	64.38	70.07	66.70	71.05	65.72
Rata-rata	70.06	72.13	69.28	73.07	71.44

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakata (DIY) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membuat kebijakan seperti yang tercermin dalam Repelita VI yang menjelaskan tentang arahan untuk peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti sektor industri, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Sesuai peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan pasal 44 ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, dalam meningkatkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) harus berdasarkan aturan penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Dalam menaikan serta menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus melihat regulasi yang berlaku seperti melihat pertumbuhan ekonomi, Kebutuhuan Hidup Layak, (KHL) dan inflasi. Dalam menentukan upah minimum bagi buruh perlu dikaji bersama antara perusahaan, pemerintah, dan pekerja. Sebab, pengkajian yang dilakukan dengan ketiga pihak yang bersangkutan tersebut agar tidak mengganggu produksi bagi perusahaan. Dan bagi pekerja menguntungkan bila

terjadinya kenaikan upah/gaji karena mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Dalam menjalani otonomi daerah, pemerintah menetapkan kebijakan penetapan upah minimum ketenagakerjaan dalam lingkup regional. Ditetapkannya upah minimum di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan pada SK/GUB/DIY/NOMOR.223/KEP/2017 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2018 gubernur menetapkan keputusan tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Pemerintah dalam menetapkan kebjakan seperti contohnya kebijakan dalam mengatur upah minimum bergantung pada besar kecilnya penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Kebijakan penetapan upah minimum diarahkan demi kesejahteraan para pekerja. Dengan dikeluarkannnya peraturan mengenai pengupahan provinsi dan kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta, para pengusaha dalam memberi upah kepada para pekerja harus melihat pedoman peraturan pengupahan yang telah ditetapkan oleh gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera bagi para pekerja.

Di Indonesia, masing-masing provinsi menetapkan upah minimjm yang berbeda-beda. Namun dalam penentuannya, masih terdapat provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di bawah nilai rata-rata UMP Nasional, khususnya di Pulau Jawa. Hampir semua provinsi di Pulau Jawa

menetapkan UMP di bawah rata-rata UMP Nasional, kecuali DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2.

Berdasakan tabel 1.2 dapat dilihat Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki urutan terakhir dalam menetapan upah minimum provinsi di Pulau Jawa. Penetapan upah minimum di DIY ini dirasa mencukupi dari angka kebutuhan hidup layak di DIY bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak di DKI Jakarta. Serta upah yang telah ditetapkan oleh DIY dapat dikatakan masih dibawah penetapan upah minimum nasional.

Dalam menetapkan kebijakan upah minimum, pemerintah melihat produktivitas dari para pekerja atau buruh itu sendiri. Semakin meningkatnya kegiatan produksi seseorang akan mampu memberi dampak dengan bentuk peningkatan pemasukkan seperti contohnya peningkatan pendapat tenaga kerja yang sebelum nya rendah menjadi tinggi sehingga mampu memberi dampak kesejahteraan kehidupan. Peningkatan produktivitas ini diukur dari tingkat pendid80ikan dari para pekerja atau dengan kata lain rata-rata lama seseorang dalam bersekolah. Upah merupakan hasil dari para pekerja selama melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuuhan hidupnya. (Widyastuti, 2012)

Tabel 1.2

Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa (juta tupiah)

Provinsi	Upah Minimum Provinsi				
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
DIY	Rp 947.114	Rp 988.500	Rp 988.500	Rp 1.237.700	Rp 1.337.645
Jawa Timur	Rp 866.250	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.273.490	Rp 1.388.000
Jawa Tengah	Rp 830.000	Rp 910.000	Rp 910.000	Rp 1.265.000	Rp 1.367.000
Jawa Barat	Rp 850.000	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 2.250.000	Rp 1.420.624
Banten	Rp 1.170.000	Rp 1.325.000	Rp 1.600.000	Rp 1.784.000	Rp 1.931.180
DKI Jakarta	Rp 2.200.000	Rp 2.441.000	Rp 2.700.000	Rp 3.100.000	Rp 3.355.750
Indonesia	**Rp 1.296.908**	**Rp 1.584.391**	**Rp 1.790.342**	**Rp 1.997.819**	**Rp 2.072.604**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas ialah pendidikan. Pendidikan dinilai mampu memberi sumber daya manusia yang berkualitas, karena pendidikan seseorang yang tinggi mencerminkan bahwa tenaga kerja tersebut bemutu tinggi, memiliki pola pikir dan cara pengambilan keputusan yang modern. Lama waktu tempuh pendidikan seseorang mampu mempengaruhi kualitas sumber daya manusia tersebut. (Andi, dkk, 2014)

Tabel 1.3

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (tahun)

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	8.02	8.20	8.40	8.50	8.64
Gunung Kidul	6.22	6.45	6.46	6.62	6.99
Sleman	10.03	10.28	10.30	10.64	10.65
Bantul	8.72	8.74	9.08	9.12	9.19
Yogyakarta	11.36	11.39	11.41	11.42	11.43

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Dapat dilihat pada tabel diatas, kota Yogyakarta menduduki posisi pertama dalam rata-rata lama waktu sekolah. Pada lima tahun terakhir tiap tahunnya semakin meningkat, terakhir pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah adalah 11,43 tahun berarti tingkat pendidikan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas setara dengan kelas satu sekolah menegah atas. Dan posisi yang terendah ialah kabupaten Gunung Kidul, meskipun dilihat dari tabel tiap tahunnya meningkat tetapi kabupaten tersebut merupakan rata-rata lama sekolah yang terendah di antara kabupaten lainnya. Berdasarkan lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di kabupaten Gunung Kidul di tahun 2017 ialah 6,99 tahun. Ini berarti secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk Gunung Kidul setara dengan tamtan seklolah menengah pertama.

Para ahli ekonomi pembangunan menjelaskan mengenai permasalahan jika terjadi di suatu negara memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar pendidikan dan kesehatan yang rendah. Hal ini menjadi sebuah kasus yang

dirasa mengalami pertumbuhan tanpa melakukan pembangunan. Pendapatn riil merupakan komponen cerimanan yang paling pentng dalam pembangunan suatu negara, namun peran pendidikan dan kesehatan juga sangat diperlukan. Peran pendidikan dan keseharan diceminkan dengan tingkat nutrisi dan energi yang dikonsumsi seseorang. Kesejahteraan seseorang dapat dinilai dari beberapa pertimbangan, contohnya pertimbangan terhadap pendidikan, pendidikan dan kesehatan. (Kumalasari, 2011)

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penetapan besaran tingkat upah yang ditentukan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penetapan upah minimum juga menyesuaikan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Adapun teori upah efisiensi menyebutkan bahwa penetapan upah minimum mampu memberi peningkatan nutrisi para tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dalam jangka panjang. Tidak hanya nutrisi para pekerja itu sendiri yang meningkat, melainkan para buruh meningkatkan nutrisi keluarga nya dengan mengkonsumsi nutrisi yang baik. Maka dari itu akan memberi dampak yang cukup berpengaruh tehadap produktivitasnya. Menurut teori upah efisiensi, upah yang dibayarkan jauh dari upah keseimbangan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah output yang dihasilkan tenaga kerja akan meningkat. Jumlah output yang diproduksi ini yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memberi pengaruh yang besar dalam penetapan nilai upah minimum karena tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap laba yang

dihasilkan. Sehingga peningkatan laba yang dihasilkan akan diikuti dengan peningkatan tingkat upah minimum sebelumnya.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kebijakan pengupahan yaitu perubahan tingkat kemakmuran dari tahun ke tahun. Pada umumnya tingkat kemakmuran suatu daerah dinilai dari besar kecilnya PDRB, namun tidak hanya PDRB ssaja yang menjadi tolak ukur tingkat kemakmuran karena besaran nilai PDRB tidak menggambarkan berapa banyak jumlah penduduk yang harus dihidupi dari PDRB. Jika di suatu daerah nilai PDRB tinggi tidak dapat di katakan bahwa daerah tersebut makmur karena jumlah penduduk di daerah tersebut juga tinggi. Sehingga ukuran yang tepat untuk mengatahui kemakmuran pada suatu daerah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Pengertian dari pendapatn per kapita sendiri ialah hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja pada waktu yang sama. Pendapatan per kapita juga menjelaskan tentang PDRB per kapita.

Nilai pendapatan per kapita di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti contohnya pada kota Yogyakarta. Pendapatan per kapita ini akan berpengaruh dengan ketetapan nilai upah minimum karena pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran masyarakatnya dalam sebuah negara. Jika pendapatan per kapita naik, maka penetapan nilai upah minimum akan mengikuti kenaikan karena masyarakat akan mampu membeli barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, sehingga mengakibatkan peningkatan pada laba para pengusaha, dan pengusaha mampu

membayar para pekerja dengan upah yang lebih tinggi. Jadi seberapa besaran tingkat kemakmuran masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai upah minimum.

Kondisi penetapan Upah Minimum Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa rendah, hal ini disebabkan oleh rata-rata pendapatan per kapita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah nilai pendapatan per kapita nasional kecuali DKI Jakarta. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan besaran upah minimum di suatu daerah ditetapkan. Penelitian ini hanya dibatasi pada faktor Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Rata-rata Lama Sekolah karena penelitian ini melihat keadaan ekonomi dan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan faktor makro ekonomi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah TPAK berpengaruh terhadap besaran nilai upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan?
2. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap besaran nilai upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap besaran nilai upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan?

4. Apakah RLS berpengaruh terhadap besaran nilai upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh TPAK terhadap nilai upah minimum yang diberlakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap nilai upah minimum yang diberlakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhdap nilai upah minimum yang diberlakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap nilai upah minimum yang diberlakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai pengaruh nilai upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

1. Manfaat Akademis
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini sebagai salah salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses kuliah, baik ilmu formal maupun informal.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang faktor-faktor dari kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakart. Serta diharapkan dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberi masukan dan menjadi pertimbangan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan besaran nilai Upah Minimum di setiap kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta demi kehidupan yang layak bagi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka, sebagai acuan dalam penulisan penelitian yang berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian penelitian yang pernah ada dengan lingkup yang sama.
2. Landasan Teori, menjelaskan teori untuk dasar mendekati dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Selain itu, landasan teori memberikan teori tentang hubungan antara variabel yang terkait.
3. Hipotesis Penelitian, menjelaskan tentang jawaban sementara dari rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan sumber data, definisi opersional variabel, dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi data, pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti dan penjelasan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian dan menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan implikasi sebagai hasil dari jawaban rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian sebelumnya

Pada kajian pustaka akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan penulis dalam membuat penelitian serta memberi tahu kerangka pemikiran dari penelitian ini. Sumber rujukan ini tidak semua persis, ada beberapa model dan variabel yang berbeda. Berikut beberapa penelitan yang dijadikan rujukan antara lain:

Ali (2018) dengan menggunakan metode *Two Stage Least Square* (TSLS), variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah investasi asing, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur maupun non manufaktur, serta PDRB menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Berbeda dengan variabel investasi dalam negeri yang menunjukkan ketidak signifikan terhadap upah minimum provinsi DKI Jakarta.

Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota pada Karyawan Swalayan di Kota Kendari yang ditulis oleh Kristinawati (2016) dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, variabel yang digunakan ialah Kebutuhan Hidup Layak karyawan swalayan di Kota Kendari, upah karyawan di Kota Kendari terhadap Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak di Kota

Kendari. Dapat disimpulkan bahwa besaran Kebutuhan Hidup Layak karyawan swalayan di Kota Kendari sebesar Rp 1.898.019,- rata-rata per karyawan. Bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan pemerintah Kota Kendari, maka nilai KHL karyawan swalayan lebih tinggi dari KHL yang ditetapkan pemerintah Kota Kendari. Dan upah karyawan swalayan yang diterima ialah Rp 1.763.514,- per bulan. Upah yang diterima karyawan swalayan ini masih dibawah Upah Minimum Kota Kendari yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari yaitu Rp 1.800.000,- per bulan.

Kristanto (2013) dalam penelitiannya dengan judul Analisi Pentapan Upah Minimum Kabupaten di Jember menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi. Penelitian ini menunjukkan variabel KHL dan PDRB memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Kabupaten Jember. Kedua variabel ini merupakan tolak ukur dalam mempertimbangkan kenaikan upah minimum. Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten Jember karena kondisi inflasi yang tidak stabil.

Noviani (2013) menganalisis tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan Inflasi. Variabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunai pengaruh signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah berarti jika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka Upah Minimum

Regional naik sebesar Rp 20.561. Berikutnya variabel inflasi dikatakan signifikan secara parsial. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi data panel *Random Effect Model (REM)* dengan metode *Generalized Least Square (GLS)*.

Hayyu (2012) menjelaskan tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap upah minimum. Hasil yang didapatkan menunjukkan variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 1993-2010, kecuali variabel pengangguran menghasilkan tidak berpengaruh signifikan dan negatif dikarenakan semakin tingginya pengangguran yang ada, maka pemerintah akan menurunkan upah.

Amundi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016 menggunakan metode analisis penyesuaian parsial atau Partial Adjustmen Model (PAM). Mendapatkan hasil bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) dan PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Regional (UMR) dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berbeda dengan variabel Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) dan Investasi yang tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan pendek terhadap Upah Minimum Regional Provinsi DIY Tahun 1990-2016.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Lokasi	Metode	Hasil
1	Ali (2018)	DKI Jakarta	*Two Stage Least Square*	Variabel investasi asing, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan non manufaktur, serta total pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap nilai UMP Provinsi DKI Jakarta dan bernilai secara positif. Berbeda dengan investasi dalam negeri yang mengatakan bahwa tidak signifikan terhadap UMP DKI Jakarta.
2	Kristinawati (2016)	Kota Kendari	Teknik Deskriptif Kuantitatif	Besar KHL Karyawan Swalayan di Kota Kendari lebih tinggi dibandingkan KHL yang ditetapkan pemerintah Kota Kendari. Serta upah karyawan yang diterima masih dibawah penetapan Upah Minimum Kota Kendari.
3	Kristanto (2013)	Jember	*Ordinary Least Square*	Dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* menunjukkan bahwa variabel KHL, PDRB memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap UMK Jember. Berikutnya variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten Jember.

4	Noviani (2013)	Provinsi Jawa Tengah	*Generalized Least Square*	Variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap UMR di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. Variabel inflasi dikatan signifikan secara parsial.
5	Hayyu (2012)	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kuantitatif	Seluruh variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penetapah upah tenaga kerja di Provinsi DIY Tahun 1993-2010. Tetapi, variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan.
6	Amundi (2018)	Daerah Istimewa Yogyakarta	*Partial Adjustmen Model*	Variabel IHK dan PDRB memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap UMR Provinsi DIY dalam jangka panjang dan pendek. Berbeda dengan variabel TPAK dan Investasi yang tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan pendek.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Amundi (2018) dan Hayyu (2012) yang membedakan ialah metode penelitian yang digunakan ialah data panel. Pada penelitian ini menggunakan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto, dan Rata-rata Lama Sekolah.

2.2 Landasan Tori

2.2.1 Pengertian Upah

Menurut Sadono Sukirno (2002: 353) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan, definisi dari upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan pengusaha atau dengan artian bayaran yang didapat menurut perjanjian kerja yang disepakati dengan pemberian pekerjaan kepada pekerja atau buru atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjungan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu jasa atau pekerjaan yang telah dijalankan.

oleh kedua belah pihak meliputi tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dikeluarkan.

2.2.2 Teori Upah Efisiensi

Perusahaan dapat dikatakan akan beroperasi lebih efisien jika upah yang ditetapkan berada di atas ekuilibrim, menurut teori ekonomi efisiensi. Maka akan lebih menguntungkan jika perusahaan mampu mempertahankan upah yang tinggi

meskipun penawaran tenaga kerja melebihi dari permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut pandangan perusahaan, dengan kenaikan tingkat upah akan memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan lebih yang didapat dari sebelumnya, sehingga bisa menaikkan efisiensi para tenaga kerja.

Menurut Cafferty (1990) yang mengembangkan teori upah efisiensi, menganalisis jika pekerja mendapatkan upah yang tinggi maka dia mampu mencukupi kebutuhan fisik hidupnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan fisiknya pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang dan perusahaan akan mendapatkan timbal baliknya yaitu pekerja akan memberikan konsentrasi penuh serta mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat pekerjaannya. Bagi perusahaan dampak ekonomi yang dimunculkan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan pekerja mendapatkan upah yang tinggi maka pekerja pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan dengan hasil yang lebih memuaskan sehinggadengan demikian pekerja akan merasa lebih puas atas hasil pekerjaannya sedangkan bagi perusahaan merasa tidak mengalami kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi dan beursaha dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya.

2.2.3 Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 definisi upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan ynag layakdi setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan pengertian suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jas yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetpakan atas dasar suatu kesepakatan atau persetujuan yang terdapat di perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik bagi karyawan itu sendiri atau dengan keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum yaitu:

1) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertaa kali dia diterima bekerja

2) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar samapai pada tingkat pendapatan *"living wage"*, yang di artikan bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.

2.2.4 Ketentuan dan Penetapan Upah Minimum

Pemerintah dalam kurun waktu satu tahun sekaliatau dalam dua tahun menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi atau untuk beberapa daerah kabupaten yang berdekatan (Simanjuntak, 2002:60). Tujuan penetapan upah minimum adalah:

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar yang surplus, yang mendorong mereka menerima upah di bawah tingkat kelayakan.
2. Menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar kerja untuk akumulasi keuntungannya.

3. Mengurangi tingkat kemiskinan absolute pekerja, terutama jika upah minimum tersebut di hubungkan dengan kebuthan dasar pekerja dan keluarganya.
4. Mendorong peningkatan produktivitas baik melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya menejemen untuk mendapatkan kompensasi atas peningkatan upah minimum.
5. Meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi seara umum
6. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis.

Dalam menetapkan UMK didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ditentukan oleh Dewan Pengupahan yang beranggotakan dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pakar praktisi. Yang dimaksud pemerintah disini adalah Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar praktisi dan lain sebagainyayang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, peran Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) adalah sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Semua pihak yang berwenang dalam memutuskan apakah tingkat upah yang ditetapkan layak untuk dinaikkan atau belum dan mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu. (Tjiptoherijanto, 2000)

2.2.5 Prinsip-prinsip dalam Penetapan Kebijakan Upah Minimum di Indonesia

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 menyebutkan bahwa ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia, diantaranya:

1. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
2. Upah minimum wajib diterima oleh pekerja secara bulanan atau dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha seperi cntohnya upah mingguan atau upah bulanan.
3. Besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
4. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja dibawah satu tahun.
5. Peninjauan upah dilakukan atas perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.
6. Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah rendahnya adalah sebesar upah minium untuk upah bulanannya.
7. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasarkan hari kehadiran.
8. Perusahaan yang telah menetapkan upah di atas upah minimum tidak diperbolehkan untuk menurunkan upah.

9. Dengan kenaikan upah minimum, pekerja wajib untuk menjaga prestasi (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha.
10. Pengusaha yang merasa tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diperbolehkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Definisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah suatu standar minimu yang diterpakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah/gaji kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Kabupaten/Koat pada kurun waktu tertentu. (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989).

2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Greogory Mankiw (2013: 11) definisi Angkatan kerja *(labor force)* ialah sebagai jumlah orang yang bekerja danorang yang menganggur, sedangkan definisi dari tingkat pengangguran *(unemployment rate)* adalah persentasi dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Badan Pusat Statistik (2014) berendapat definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *(labor-force participation rate)* adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, merupakan penjelasan mengenai Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). Berikut rumus perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Badan Pusat Statistik:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \quad \text{x } 100\%$$

Menurut pandangan klasik upah akan selalu menyesuaikan diri untuk menormalkan jika terjadi penawaran tenaga kerja yang berlebih di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja yang berlebih akan mengakibatkan upah yang diterima pekerja turun. Pasar tenaga kerja dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (2002:88), kedua bentuk pasar tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, pasar tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang umumnya memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terdidik.Pada dasarnya produkivitas tenaga kerja tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dilihat dari segi waktu, penawaran tenaga kerja terdidik harus melalui proses pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, elastisitas penawaran tenaga kerja tidak terdidik lebih besar daripada elastisitas penawaran tenaga kerja terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan waktu yang banyak untuk menyeleksi tenaga kerja terdidika daripada tenaga kerja tidak terdidik. Pengertian dari penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan yang kaitannya dengan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja. Seperti halnya penawaran, permintaan tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah

tenaga kerja. Adapun motif perusahaan dalam mempekerjakan seseorang adalah demi kelancaran atas produksi barang dan jasa yang akan dijual kepada para konsumennya. Besaran permintaan perusahan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan bergantung pada seberapa minat masyarakat tertarik dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi, sebagai berikut:

$$TP = f(L, K)$$

dimana:

TP = Produksi Total (Output)

L = Tenaga Kerja

K = Modal

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk dari adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila upah diserahkan pada mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka pada saat jumlah penawaran tenaga kerja jauh di atas pemintaan tenaga kerja. Dimana tingkat upah disini tidak mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup layak. Peran pemerintah dalam menanggapi kondisi ini ialah dengan menetapkan upah minimum, dengan alasan upah yang diterima setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak terjadi di pasar tenaga kerja yang *unskilled labour*. Sehingga untuk melindungi para pekerja pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan upah minimum guna melindungi para pekerja/buruh.

2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada waktu tertentu. Sisi produksi ekonomi merubah input seperti tenaga kerja, dan output dihasilkan dari modal. Jika digambarkan input semacam buruh dan modal disebut faktor produksi, sedangkan pembayaran faktor *(factor of payment)* adalah pembayaran terhadap faktor tersebut seperti upah dan bunga. Pada prakteknya, PDRB tidak hanya digunakan untuk mengukur sebesrapa banyka output yang diproduksi, tetapi juga digunakan sebagai pengukuran kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Kenaikan PDRB akan memberi pengaruh terhadap pendapatan daerah dari sekotr pajak dan retribusi meningkat. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut.

Pemerintah dan Dewan Pengupahan dalam menetapkan upah minimum akan tetap menggunakan faktor lain yaitu laju PDRB. Jika terjadi peningkatan pada produktivitas tenaga kerja yang diukur berdasarkan output PDRB, maka upah minimum sudah selayaknya dinaikkan. Bagi suatu daerah jika terjadi peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya ialah untuk mengukur kinerja keseluruhan. Jumlah akan sama dengan jumlah dari nilai nominal konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa serta ekpor netto. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB diantaranya:

1. Pendekatan Produksi

Menggunakan pendekatan produksi, produksi nasional atau produk domestik bruto didaptkan dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan berbagai sektor perekonomian. Persamaan fungsi produksi pada pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, t)$$

dimana:

Y = Produksi

K = Modal

L = Tenaga Kerja

t = Teknologi

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor diantaranya:

a. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan,
b. Pertambangan dan penggalian,
c. Industri penggalian,
d. Listrik, gas, dan air bersih,
e. Bangunan,
f. Perdagangan, hotel, dan restoran,
g. Pengangkutan dan komunikasi,
h. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan,
i. Jasa-jasa yang termasuk dalam jasa pelayanan pemerintah.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dari penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi terhadap proses produksi. Pendapatan nasional yang dimaksud disini diperoleh atas penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan, sebagai berikut:

(a) Kompensasi untuk pekerja yang terdiri dari upah *(wages)* dan gaji *(salaries)* ditambah faktor lain yaitu pension dan dana jaminan sosial.

(b) *Corporate Provit* atau keuntungan perusahaan merupakan kompenssasi kepada pemilik perusahan yang mana kompensasi tersebut digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan, dengan cara dibagikan kepada para pemilik saham atau *stockholders* sebagai deviden dan sisanya ditabung perusahan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

(c) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber lainnya (*self employeed person, self employeed professional)*.

(d) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang dibagikan untuk pemilik tanah, *rental business*, dan *recidential properties*.

(e) *Net interest* atau bunga netto yang terdiri dari bunga yang dibayarkan perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan, kemudian ditambah bunga netto yang diperoleh dari

luar negeri. Yang tidak termasuk didalamnya ialah bunga yang dibayar pemerintah dan konsumen.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd$$

dimana:

NI = Pendapatan Nasional

YW = Pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum dikenakan pajak

Yi = Pendapatan dari bunga

Ynr = Pendapatan dari keuntungan perusahaan Y

Ynd = Pendapatan lainnya sebelum dikenakan pajak

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang didapat dengan menjumlahkan nilai pasar dari keseluruhan permintaan akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar yang sedang berlaku. Pada pendekataan ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan untuk barang konsumsi dan jasa-jasa pada sektor rumah tangga yang dilambangkan (C), permintaan di ektor bisnis seperti barang-barang investasi dilambangkan (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa dilambangkan (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan sektor ekspor dan impor dilambangkan (X – M).

Terdapat perhitungan yang digunakan untuk menghitung output pada perekonomian melalui pendekatan pengeluaran sehingga dapat dijelaskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

dimana :

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

(X – M) = ekspor dikurangi impor (ekspor neto)

PDRB merupakan permintaan akhir dari semua komponen, yang terdiri dari:

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan nirlaba
b) Konsumsi pemerintah
c) Pembentukan modal tetap domestik bruto
d) Perubahan stok
e) Ekspor netto

2.2.8 Pendapatan per Kapita

Nilai pendapatan per kapita dapat digunakan dalam salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatau daerah. Menurut Badan Pusat Statistik pengertian pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada periode tertentu. Masyarakt dinilai mengalami peningkatan kemakmuran apabila terjadi peningkatan pendapatn per kapita riil meningkat atau pendapatan per kapota menurut harga konstan. Pendapatan per kapita didapat dari hasil bagi antara nilai tambha yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Nilai pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk. Kenaikan pendapatan per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 yang merupakan pendapatn per kapita hasil bagi dari PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu

sebagai dasar terhadap jumlah penduduk. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$IPCn = \frac{PDB}{Pn}$$

dimana:

IPCn = Income Per Capita (Pendapatan per Kapita) pada tahun n

GNPn = Gross National Product (Produk Nasional Bruto) pada tahun n

Pn = Population (Jumlah Penduduk) pada tahun n

Pendapatan per kapita mempunyai efek positif terhadap upah minimum. Apabila nilai pendapatan per kapita tinggi, maka akan diikuti dengan kenaikan upah minimum. Kondisi ini terjadi karena tingkat upah minimum mengacu pada tingkat kemakmuran suatu negara yang dinilai dari pendapatan per kapita

2.2.9 Rata-rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tinggi pendidikan yang dicapai masyarakat pada suatu daerah. Tingginya seseorang menjalani jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula rata-rata lama sekolah yang ditempuh. Asumsi lain yang mendasari kualitas seseorang baik pola pikir maupun tindakannya dapat tercermin dari jenjang pendidikan yang ditempuh semakin tinggi. mengemukakan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan serta upah yang lebih baik bila dibandingkan

dengan orang yang berpendidikan rendah. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan penduduk di suatu wilayah yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah ini juga menggambarkan tentang kualitas pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Adapun penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, sedangkan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungakan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

3.0.0 Hipotesis

1. Terdapat pengaruh positif antara TPAK terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2013-2017.
2. Terdapat pengaruh positif antara PenKap terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2013-2017.
3. Terdapat pengaruh positif antara PDRB terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2013-2017.
4. Terdapat pengaruh negatif antara RLS terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2013-2017.

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (Y) adalah Upah Mnimum Kabupaten/Kota (Y), variabel independen (X1) adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), variabel independen (X2) adalah Pendapatan per Kapita, variabel

indpenden (X3) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), variabel independen (X4) adalah Rata-rata Lama Sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Definisi dari variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan variasi pada nilai. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel, diantaranya:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sebuah masalah pada hakikatnya mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model variabilitas dari atau atas faktor ilmiah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti. Pada penilitian ini yang menjadi variabel dependen ialah Upah Minimum Kabupaten/Kota (Y). Upah Minimum Kabupaten adalah ketetapan upah minimum yang dipakai oleh pemerintah tingkat provinsi sebagai jarring pengaman perusahan dalam memberikan upah pekerja. Variabel ini ditentukan setiap tahun berdasarkan tawar menawar antara pekerja, pemerintah, dan pengusaha dalam Dewan Pengupahan.

b. Variabel Independent

Pada variabel ini yaitu variabel independent dilambangkan dengan (X) adah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang berpengaruh positif maupun negatif. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. TPAK (X1)

   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan atau memperoleh pendapatan.

2. PenKap (X2)

   Pendapatan per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu.

3. PDRB (X3)

   Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.Perhitungan PDRB dalam penelitian ini menggunakan harga konstan.

4. RLS (X4)

   Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan penduduk di suatu wilayah yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis memilih ruang lingkup Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penulisan ini dilakukan dengan mencari data sekunder mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Metode Data Panel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat penelitian dengan analisis yang menggunakan data panel. Menurut Agus Widarjono (2013) definisi data panel adalah data regresi penggabungan antara data times series dan cross section. Data time seris merupakan data yang disusun berdasarkan urut waktu, sepeti contohnya harian, bulanan, kuartal, dan tahunan. Sedangkan data cross section adalah data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Adapun keuntungan dari menggunakan data panel, antara lain:

Pertama, data panel merupakan gabungan dari dua data time series dan cross section sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar.

Kedua, penggabungan data time series dan cross section mampu mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilangan variabel. Maka persaman model yang menggambarkan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Yit = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon it$$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N dan T = banyaknya data panel

$_I$ = 1, 2,….., N

$_t$ = 1, 2,…..,N

b. Model Penelitian

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan tujuan untuk mengukur pengaruh yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section. Dengan demikian mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Selanjutnya penggabungan informasi data dari time series dan cross section. Analisi data yang digunakan dalam regresi tersebut dengan menggunakan program *Eviews 9*. Untuk melakukan regresi terhadap variabel maka peneliti menggunakna tiga metode, yaitu: *Common Effect, Fixed Effect,* dan *Random Effect.*

c. Estimasi Regresi Data Panel

1. Common Effect Model (CEM)

Pendekatan *Common Effect Model* (CEM) merupakan pendekatan yang menggabungkan seluruh data *time series* dan

cross section. Kemudian, setelah itu mengestimasi model dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Adapun fungsinya sebagai berikut (Sriyana, 2014):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

2. ***Fixed Effect Model(FEM)***

Model ini diasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antara ruang dan waktu. Dalam estimasi model fixed effect dapat dilakukan dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersbut. Model estimasi ini dinamakan dengan least Square Dummy Variabel (LSDV) dan ketika terdapat heterokedastisitas menggunakan fixed effect dengan cross section weight. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{5it} + \beta_6 D_{6it} + \beta_7 D_{7it} + \beta_8 D_{8it} + \ldots + e_{it}$$

3. Random Effect Model (REM)

Model ini memilih estimasi data panel dengan residual yang memungkinkan saling berhuungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep yang berbeda. Dengan demikian kita mengasumsikan setiap intersep adalah variabel random atau stokastik. Model persamaan random effect dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_i$$

d. Kesesuaian Model

Ada tiga teknik estimasi dalam data panel, yaitu *common effect, fixed effect,* dan *random effect.* Untuk mengetahui model amna yang akan digunakan , maka diperlukan pengujian yang dinamakan uji pemilihan model. Pemilihan model yang akan digunakan dalam penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistic. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pemilihan model, antara lain:

1. *Chow Test* (uji F-statistik) merupakan metode yang digunakan untuk memilih antara model common effect dan model fixed effect.
2. *Uji Hausman* merupakan metode yang digunakan untuk memilih antara model fixed effect dan random effect.

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian analisis antara *Common Effect Models* atau *Fixed Effect Models* yang digunakan dalam estimasi data panel.

Hipotesis uji chow yaitu:

H_0 : *Common Effect Models*

H_1 : *Fixed Effect Models*

Dari hasil *Uji Chow* disimpulkan:

- Jika probabilitas < α (alpha) maka menolak H_0 yang artinya model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect Models*.
- Jika probabilitas > α (alpha) maka menolak H_1 yang artinya model yang baik digunakan adalah *Common Effect Models*.

2. Uji Hausman

Uji *Hausman* merupkan uji untuk memilih model antara *Fixed Effect Models* atau *Random Effect Models*. Hipotesis dalam Uji *Hausman* yaitu:

H_0 : *Random Effect*

H_1 : *Fixed Effect*

- Jika probabilitas < α (alpha) maka menolak H_0 yang artinya model yang lebih baik menggunakan *Fixed Effect Models*.
- Jika probabilitas > α (alpha) maka gagal menolak H_0 yang artinya bahwa lebih baik menggunakan *Random Effect Models*.

e. Uji Statistik

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan uji yang berguna untuk memilih proporsi atau presentase total variasi dalam suatu variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Jika yang digunakan merupakan analisis regresi sederhana maka

menggunakan nilai *R Square*. Akan tetapi jika menggunakan regresi berganda maka yang digunakan merupakan *Adjusted R Square. Adjusted R Square* dapat di lihat dalam *Model Summary*. Dalam kolom *Adjusted* R^2 diketahui seberapa presentase yang dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, sisanya di jelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian.

Dimana:

R^2 = Koefisien Determinasi

ESS = *Explained Sum Squared* (Jumlah kuadrat yang dijelaskan)

TSS = *Total Sum Squared* (Jumlah total kuadrat)

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah pengujian variabel secara individu yang bertujuan untuk melihat variabel-variabel independen secara menyeluruh apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai dari F-hitung > nilai F-kritis maka variabel independen secara menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ maka variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai probabilitas > α (alpha) maka menolak H_0 dan gagal menolak H_0, yang artinya bahwa variabel independen secara bersamaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai probabilitas < α (alpha) maka gagal menolak H_0 dan menolak Ha, yang artinya bahwa variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji t adalah suatu uji dari variabel independen yang dilakukan secara individu yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan anggapan bahwa variabel lainnya bersifat tetap. Hipotesis uji t sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Ha : $\beta_1 > 0$ artinya bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara positif.

Ha : $\beta_1 < 0$ artinya bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara negatif.

Rumus t hitung = $\frac{\boldsymbol{\beta 1}}{\boldsymbol{S}\text{e}\,(\boldsymbol{\beta 1})}$

Keterangan:

β_1 = Standar koefisien variabel

Se = Standar error variabel independen

Jika t-hitung < t-tabel, maka menerinma H_0 yang artinya bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Jika t-hitung > t-tabel, maka gagal menerinma H_0 yang artinya bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

BAB IV
HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Analisis Deskripsi Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan daro data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* meliputi 5 kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul serta Kota Yogyakarta. Sedangkan data*cross section* meliputi Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto, dan Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2013-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	UMK	TPAK	PenKap	PDRB	RLS
Mean	1204431.	71.19560	18.63880	16754316	9.130400
Maximum	1572200	80.20000	26.10400	31155676	11.43000
Minimum	947114.0	64.38000	14.24100	5741660.	6.220000
Std. Deviasi	171003.1	4.591455	3.566949	8073099.	1.721885
Observations	25	25	25	25	25

Sumber: Data diolah Eviews 9

Analisis Statistik Deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah observasi 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2017, diperoleh hasil analisis bahwa rata-rata dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.204.431. Kemudian angka Upah Minimum Kabupaten/Kota tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dan angka Upah Minimum Kabupaten/Kota terendah terdapat pada Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 947.114 tahun 2013 dengan standar deviasi sebesar Rp 171.003.

Kemudian angjka variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi ialah pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 80.20 persen pada tahun 2016. Sedangkan angka terendah sebesar 64.38 persen terdapat pada Kota Yogyakarta pada tahun 2013. Rata-rata dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2017 sebesar 71.19 persen dengan standar deviasi sebesar 4.59 persen.

Pada variabel Pendapatan per Kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta nilai rata-rata ialah Rp 18.638 pada periode 2013-2017. Pendapatan per Kapita teritinggi terjadi di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sebesar Rp 26.104dan nilai terendah terjadi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 sebesar Rp 14.241. Dengan standar deviasi sebesar Rp 3.566.

Pada variabel Produk Domestik Regional Bruto, rata-rata produk domestik regional bruto di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2017 yaitu sebesar Rp 16.754.316. Kabupaten Sleman pada periode 2017 sebesar Rp 31.155.676 merupakan wilayah yang tertinggi dari produk domestik regional bruto, sedangkan

nilai produk domestik regional bruto terendah terjadi pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 sebesar Rp 5.741.660. Dengan standar deviasi sebesar Rp 8.073.099.

Pada variabel Rata-rata Lama Sekolah, daerah yang rata-rata lama sekolah tinggi adalah Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar 11.4 tahun, sedangkan kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 merupakan daerah yang terendah rata-rata lama sekolah sebesar 6.22 tahun. Nilai rata-rata dari lama sekolah ialah 9.13 tahun dan standar deviasi sebesar 1.72 tahun.

4.2 Hasil Uji Model Regresi Data Panel

4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Model regresi data panel terdapat tiga macam model regresi antara lain, *common effect, fixed effect* dan *random effect*. Pemilihan model regresi ini dirasa perlu dilakukan karena agar mampu memperoleh perkiraan yang efisien.

4.2.2 *Chow Test* (Uji F-statistik)

Uji ini dilakukan dengan tujuan mengetahui teknik regresi data panel mana yang lebih baik digunakan *common effect* atau model regresi *fixed effect* dengan uji hipotesis sebagai berikut:

Untuk menentukan uji pemilihan estimasi *Common Effect* atau estimasi *Fixed Effect* dapat ditentukan dari melihat nilai p-value apabila signifikan (≤ 5%) maka model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect.* Namun jika nilai p-value tidak signifikan (≥5%) maka dapat disumpulkan model yang digunakan adalah model *Common Effect*.

Tabel 4.2
***Chow Test* (uji F-statistik)**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	282.993683	(4,16)	0.0000
Cross-section Chi-square	106.829146	4	0.0000

Sumber: data diolah *Eviews 9*

Dapat dilihat nilai distribusi *Chi – square* dari perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan *Eviews 9* sebesar 106,829146 nilai probabilitas yaitu

0.0000 (kurang dari 5%), signifikan sehingga model yang digunakan adalah model estimasti *Fixed Effect* dengan begitu perlu adanya penggunaan uji hasuman.

4.2.3 *Hausman Test* (Uji Hausman)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik digunkana daripada fixed effect.

H0 : random Effect

H1 : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 5% maka sebaiknya model menggunkan rndom effect. Hasil dari estimasi menggunkaan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1131.974733	4	0.0000

Sumber: data diolah *Eviews9*

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0.0000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan fixed effect.

4.2.4 Analisis Data Panel

Dari uji spesifikasi di atas, maka model sebaiknya menggunakan estimasi fixed effect. Pada pengujian sebelumnya, modle telah lolos uji asumsi klasik,

sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data panel adalah sebagai berikut

Tabel 4.4
Estimasi Uji Regresi *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.43568	1.064564	-15.43888	0.0000
TPAK	0.000666	0.001562	0.426240	0.6756
LOGPENKAP	0.066424	0.030853	2.152900	0.0469
LOGPDRB	1.844286	0.091944	20.05869	0.0000
LOGRLS	-0.114971	0.245921	-0.467514	0.6464

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990806	Mean dependent var	13.99191
Adjusted R-squared	0.986210	S.D. dependent var	0.141391
S.E. of regression	0.016604	Akaike info criterion	-5.084648
Sum squared resid	0.004411	Schwarz criterion	-4.645852
Log likelihood	72.55810	Hannan-Quinn criter.	-4.962944
F-statistic	215.5433	Durbin-Watson stat	2.340786
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah *Eviews*

Dari hasil di atas diketahui probabilitas untuk variabel Pendapatan per Kapita dan PDRB memiliki pengaruh signifikan dalam taraf eror 5% sedangkan untuk variabel TPAK dan Rata-rata Lama Sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap UMK karena memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05.

4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Dapat dilihat bahwa hasil regresi koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.990806. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa variabel dependent Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat dijelaskan oleh varibel independent yaitu

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 99,0% dan sisanya sebesar 1% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya selain variabel pada penelitian ini.

4.2.5 Uji Serempak (uji F)

Dilakukannya pengujian F dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent atau tidak mempengaruhi. Nilai F-statistik adalah sebesar 215.5433 dengan probabilitas sebesar 0.000000 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara bersama-sama signifikan mempengaruhi varibel dependent.

4.2.6 Uji t

Tabel 4.5
Estimasi Pengujian Hipotesis

Variabel	t-statistik	Prob.	Keterangan
TPAK	0.426240	0.6756	TIDAK SIGNIFIKAN
PenKap	2.152900	0.0469	SIGNIFIKAN
PDRB	20.05869	0.0000	SIGNIFIKAN
RLS	-0.467514	0.6464	TIDAK SIGNIFIKAN

Sumber data diolah

Berdasarkan uji *fixed effect* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X1) berpengaruh positif dan tidak signfikan karena prob 0.6756 > α 5% terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (Y), tidak sesuai dengan hipotesa dan teori yang menyatakan TPAK berpengaruh postif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017 maka h1 ditolak.

Berdasarkan uji *fixed effect* Pendapatan per Kapita (X2) berpengaruh positif dan signifikan karena prob. 0.0469 < α 5% terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (Y), sesuai dengan teori dan hipotesa yang menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017 maka h2 diterima.

Berdasarkan uji *fixed effect* Produk Domestik Regional Bruto (X3) berpengaruh positif dan signifikan karena prob 0.0000 < α 5% terhadap Upah

Minimum Kabupaten/Kota (Y), sesuai dengan hipotesa dan teori yang menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017 maka h3 diterima.

Berdasarkan uji *fixed effect* Rata-rata Lama Sekolah (X4) berpengaruh positif dan tidak signfikan karena prob 0.6464 > α 5% terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (Y), tidak sesuai dengan hipotesa dan teori yang menyatakan TPAK berpengaruh postif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017 maka h4 ditolak.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Koefisien variabel dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 0.000666 dan t-statistik sebesar 0.426240 sedangkan probabilitas sebesar 0.6756 ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota. Artinya, ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik sebesar 1% maka tidak akan mempengaruhi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2017.

2. Pendapatan per Kapita

Koefisien variabel dari Pendapatn per Kapita adalah 0.066424 dan t-statistik sebesar 2.152900 sedangkan probabilitas sebesar 0.0469 ini dapat diartikan secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pendapatan per Kapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel dependent yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita 1% maka akan

menyebabkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 0.06% pada tahun 2013-2017.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Koefisien variabel dari PDRB adalah 1.844286 dan nilai t-statistik sebesar 20.05869 sedangkan probabilitas sebesar 0.0000 ini dapat diartikan secara statistik menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan PDRB sebanyak 1% maka akan menyebabkan penambahan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1.84% pada tahun 2013-2017.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Koefisien variabel dari Rata-rata Lama Sekolah adalah -0.114971 dan nilai t-statistik sebesar -0.467514 sedangkan probabilitas sebesar 0.6464 ini dapat diartikan secara statistik menunjukkan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017.

4.3 Analisis Ekonomi

4.3.1 Analisis Pengaruh TPAK terhadap UMK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yaitu 15 tahun untuk menghitung partisipasi angkatan kerja. TPAK tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017. Hal ini disebabkan karena pemerintah lebih menggunakan Pendapatan per Kapita dan PDRB untuk menentukan besaran nilai upah minimum yang ditetapkan. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi besar TPAK di suatu wilayah yaitu penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil pula jumlah angkatan kerja serta nilai TPAK pun kecil. Penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga dikatakan sebagai Bukan Angkatan Kerja, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada lima tahun terakhir jumlah Bukan Angkatan Kerja tersebut cenderung berfluktuasi sehingga besaran TPAK nya selalu berubah-ubah, besaran nilainya tidak tetap. Hasil penelitian ini sama dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Alan (2018) bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

4.3.2 Analaisis Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap UMK

Dari hasil regresi yang telah diolah, menunjukkan bhawa variabel Pendapatan per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Nilai koefisien dari hasil regresinya variabel Pendapatan per Kapita sebesar 0,066424 sehingga apabila terjadi peningkatan Pendapatan per Kapita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,06% pada tahun 2013-2017. Variabel Pendapatan per Kapita mampu meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota dikarenakan dalam penetapan besaran nilai upah selalu dilihat dari tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila tingkat kemakmuran suatu daerah naik, maka akan menyebabkan kenaikan upah. Pendapatan per Kapita merupakan pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi seperti hal nya dalam menentukan Upah Minimum Provinsi karena variabel ini merupakan indikator standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun.

4.3.3 Analisis PDRB terhadap UMK

Hasil analisis dari variabel PDRB menunjukkan bahwa memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Nilai koefisien dari hasil regresinya ialah 1,844286 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar Rp 18.442,86 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2017. Ketika PDRB di suatu daerah mengalami peningkatan maka akan berdampak dengan penetapan upah minimum yang juga mengalammi kenaikan, secara teoritis PDRB berkaitan erat dengan nilai upah minimum. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ninda (2013) yang mengatakan bahwa ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berdampak pada penetapan upah minimum yang juga mengalami peningkatan.

4.3.4 Analisis Rata-rata Lama Sekolah terhadap UMK

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dari tingkat pendidikan. Dari hasil regresi yang telah diolah variabel Rata-rata Lama Sekolah nilai koefisiennya sebesar -0,114971 menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan mengukur dalam jangka pendek yaitu 5 tahun . Jika terjadi penurunan pada tingkat pendidikan, maka tingkat upah pekerja naik sebesar -0,114.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis yang diperoleh variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) positif dan tidak berpengaruh terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil pula jumlah angkatan kerja serta nilai TPAK pun kecil. Penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga dikatakan sebagai Bukan Angkatan Kerja.
2. Variabel Pendapatan per Kapita menunjukkan positif dan berpengaruh terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terji karena dalam penetapan besaran nilai upah selalu dilihat dari tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila tingkat kemakmuran suatu daerah naik, maka akan menyebabkan kenaikan upah.
3. Variabel PDRB dari hasil analisis diperoleh berpengaruh dan positif terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara teoritis PDRB berkaitan erat dengan nilai

upah minimum, ketika PDRB mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan upah di sutu wilayah.

4. Variabel Rata-rata Lama Sekolah merupakan salah satu indikator dari tingkat pendidikan di suatu wilayah. Pada penelitian ini variabel Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan hasil analisis negatif dan tidak berpengaruh terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Saran

1. Dalam menetapkan besaran upah minimum di suatu wilayah, pemerintah perlu mengkaji lagi dengan para pengusaha dalam memberi besaran upah kepada buruh sehingga tercipta kesejahteraan yang merata di setiap kabupaten ataupun kota. Hal ini baik dipertimbangkan oleh pemerintah karena mencegah terjadinya kesalah pahaman dalam penetapan upah minimum antara pemerintah dengan pengusaha.
2. Pemerintah dalam menanggulangi tingkat pengangguran di suatu wilayah perlu adanya perhatian terhadap kegiatan berwirausaha untuk para ibu-ibu yanng mengurus rumah tangga. Dengan demikian mampu meningkatkan pendapatan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2014-2017. Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka. Kulon Progo: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2014-2017. Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka. Gunung Kidul: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2014-2017. Kabupaten Bantul Dalam Angka. Bantul: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2014-2017. Kabupaten Sleman Dalam Angka. Sleman: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2014-2017. Kota Yogyakarta Dalam Angka. Kota Yogyakarta: Badan Pusat Statistik

Bersales, Lisa Grace. (2014) "Determinants of Regional Minimum Wages in the Philippines" Jurnal Statistik: Philippines School of Statistics, University of the Philippines Diliman

Firna, H. (2012). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum di Provinsi DIY Tahun 1993-2010". Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kistanto, I. (2013), "Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember", Skripsi Sarjana Fakulats Ekonomi, Universitas Jember, Jember.

Krisnawati, D. (2016), "Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum pada Karyawan Swalayan di Kota Kendari", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, Kendari.

Kumalasari, M. (2011),"Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Noviani, N. (2013), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 4, 2013.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-05/Men/1989 Tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per – 01/Men/1999 *tentang Upah Minimum*

Sidiq M A. N. (2018), " Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Provinsi terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB di Provinsi DKI Jakarta", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sadono, S. 2013, *Makro Ekonomi*, Rajawali Grafindo Ppersada, Jakarta

Simanjuntak, Payaman, J., 2002, *"Masalah Upah dan Jaminan Sosial"*, dalam undang-undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kantor Perburuhan: Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Wibowo, A. A. (2018), "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional Provinsi DIY Tahun 1990-2016", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta

Widarjono, A. (2013). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: Disertai Panduan Eviews, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Widyastuti, A. (2012), "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2012.

Wijaya, A. dkk (2014). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2014.

Witjaksono, M. (2009), "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2009.

LAMPIRAN I

Data Upah Minimimum Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto, dan Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten/Kota	Tahun	UMK	TPAK	PenKap	PDRB	RLS
Kulon Progo	2013	954.339	75,61	14,241	5741660,3	8,02
	2014	1.069.000	77,34	14,727	6004316,4	8,20
	2015	1.138.000	75,62	15,793	6281795,8	8,40
	2016	1.268.870	80,20	15,793	6580776,1	8,50
	2017	1.373.600	74,61	16,553	6973625,5	8,64
Gunung Kidul	2013	947.114	77,87	14,535	10177432,51	6,22
	2014	988.500	77,65	15,032	10639792,32	6,45
	2015	1.108.249	70,77	15,592	11152363,12	6,46
	2016	1.235.700	75,14	16,191	11697446,94	6,62
	2017	1.337.650	74,50	16,840	12282493,62	6,99
Sleman	2013	1.026.181	65,67	20,289	25367414,2	10,03
	2014	1.127.000	68,05	21,221	26713071,2	10,28
	2015	1.200.000	65,45	22,218	28098006,9	10,30
	2016	1.338.000	69,67	23,138	29573895	10,64
	2017	1.448.385	70,17	24,067	31155676	10,65
Bantul	2013	993.484	66,78	25,052	14138719,3	8,72
	2014	1.125.500	67,55	26,104	14851124,13	8,74
	2015	1.163.800	67,84	16,029	15588520,43	9,08
	2016	1.297.000	69,27	16,652	16377984,32	9,12
	2017	1.404.760	72,21	17,294	17211819,3	9,19
Kota Yogyakarta	2013	1.065.247	64,38	17,727	20239557,70	11,36
	2014	1.173.300	70,07	18,456	21307763,60	11,39
	2015	1.302.500	66,70	19,181	22393012,20	11,41
	2016	1.452.400	71,05	22,490	23538101,80	11,42
	2017	1.572.200	65,72	20,755	24771529,99	11,43

LAMPIRAN II

Tabel *Common Effect*

Dependent Variable: LOGUMK
Method: Panel Least Squares
Date: 04/11/19 Time: 01:23
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.731508	1.830368	5.316694	0.0000
TPAK	0.018582	0.009753	1.905302	0.0712
LOGPENKAP	0.065448	0.213817	0.306094	0.7627
LOGPDRB	0.118006	0.087152	1.354022	0.1908
LOGRLS	0.364454	0.190647	1.911669	0.0704

R-squared	0.340376	Mean dependent var	13.99191
Adjusted R-squared	0.208451	S.D. dependent var	0.141391
S.E. of regression	0.125794	Akaike info criterion	-1.131482
Sum squared resid	0.316484	Schwarz criterion	-0.887707
Log likelihood	19.14352	Hannan-Quinn criter.	-1.063869
F-statistic	2.580074	Durbin-Watson stat	0.702692
Prob(F-statistic)	0.068673		

LAMPIRAN III

Tabel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGUMK
Method: Panel Least Squares
Date: 04/11/19 Time: 01:25
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.43568	1.064564	-15.43888	0.0000
TPAK	0.000666	0.001562	0.426240	0.6756
LOGPENKAP	0.066424	0.030853	2.152900	0.0469
LOGPDRB	1.844286	0.091944	20.05869	0.0000
LOGRLS	-0.114971	0.245921	-0.467514	0.6464

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990806	Mean dependent var	13.99191
Adjusted R-squared	0.986210	S.D. dependent var	0.141391
S.E. of regression	0.016604	Akaike info criterion	-5.084648
Sum squared resid	0.004411	Schwarz criterion	-4.645852
Log likelihood	72.55810	Hannan-Quinn criter.	-4.962944
F-statistic	215.5433	Durbin-Watson stat	2.340786
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN IV

Tabel *Random Effect Model*

Dependent Variable: LOGUMK
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/11/19 Time: 01:27
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.731508	0.241595	40.28032	0.0000
TPAK	0.018582	0.001287	14.43494	0.0000
LOGPENKAP	0.065448	0.028222	2.319030	0.0311
LOGPDRB	0.118006	0.011503	10.25833	0.0000
LOGRLS	0.364454	0.025164	14.48317	0.0000

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	3.20E-07	0.0000
Idiosyncratic random	0.016604	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.340376	Mean dependent var	13.99191
Adjusted R-squared	0.208451	S.D. dependent var	0.141391
S.E. of regression	0.125794	Sum squared resid	0.316484
F-statistic	2.580074	Durbin-Watson stat	0.702692
Prob(F-statistic)	0.068673		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.340376	Mean dependent var	13.99191
Sum squared resid	0.316484	Durbin-Watson stat	0.702692

LAMPIRAN V

Tabel *Uji Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	282.993683	(4,16)	0.0000
Cross-section Chi-square	106.829146	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOGUMK
Method: Panel Least Squares
Date: 04/11/19 Time: 01:30
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.731508	1.830368	5.316694	0.0000
TPAK	0.018582	0.009753	1.905302	0.0712
LOGPENKAP	0.065448	0.213817	0.306094	0.7627
LOGPDRB	0.118006	0.087152	1.354022	0.1908
LOGRLS	0.364454	0.190647	1.911669	0.0704

R-squared	0.340376	Mean dependent var	13.99191
Adjusted R-squared	0.208451	S.D. dependent var	0.141391
S.E. of regression	0.125794	Akaike info criterion	-1.131482
Sum squared resid	0.316484	Schwarz criterion	-0.887707
Log likelihood	19.14352	Hannan-Quinn criter.	-1.063869
F-statistic	2.580074	Durbin-Watson stat	0.702692
Prob(F-statistic)	0.068673		

LAMPIRAN VI

Tabel *Uji Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1131.974733	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPAK	0.000666	0.018582	0.000001	0.0000
LOGPENKAP	0.066424	0.065448	0.000155	0.9376
LOGPDRB	1.844286	0.118006	0.008321	0.0000
LOGRLS	-0.114971	0.364454	0.059844	0.0500

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LOGUMK
Method: Panel Least Squares
Date: 01/14/19 Time: 16:43
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.43568	1.064564	-15.43888	0.0000
TPAK	0.000666	0.001562	0.426240	0.6756
LOGPENKAP	0.066424	0.030853	2.152900	0.0469
LOGPDRB	1.844286	0.091944	20.05869	0.0000
LOGRLS	-0.114971	0.245921	-0.467514	0.6464

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990806	Mean dependent var	13.99191
Adjusted R-squared	0.986210	S.D. dependent var	0.141391
S.E. of regression	0.016604	Akaike info criterion	-5.084648
Sum squared resid	0.004411	Schwarz criterion	-4.645852
Log likelihood	72.55810	Hannan-Quinn criter.	-4.962944
F-statistic	215.5433	Durbin-Watson stat	2.340786
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN VII

Data Intersep di Daerah Istimewa Yogyakarta

Crossid	Effect
Kulon Progo	1.528707
Gunung Kidul	0.412806
Sleman	-1.165204
Bantul	-0.113933
Kota Yogyakarta	-0.662376

Sumber: Olah Data Eviews9